

STRATEGI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SUMBAWA DALAM MENANGANI ISU STRATEGIS INFRASTRUKTUR

Feny Dwi Maharani^{1*}, Dedi Supriadi²

¹²Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: fenydwimaharani@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Received : 28 Maret 2026 Accepted : 15 April 2026 Published : 30 April 2026	<i>This research aims to analyze the strategy of the Regional Development Planning, Research and Innovation Agency (Bappeda) of Sumbawa Regency in addressing strategic infrastructure issues for 2024-2025. Infrastructure is one of the main strategic issues in the Sumbawa Regency RPJMD 2021-2026, playing an important role in supporting economic growth, equitable development, and achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). This research employs a qualitative approach with a descriptive method, using data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data analysis uses strategic management theory covering strategy formulation, strategy implementation, and strategy evaluation, as well as public policy implementation theory. The results show that Bappeda Sumbawa Regency has integrated infrastructure development into regional planning documents through cross-Regional Apparatus Organization (OPD) coordination and alignment with national policies and SDGs. However, implementation still faces constraints in the form of budget limitations, human resources, and suboptimal inter-agency coordination. Institutional capacity strengthening and cross-sector synergy are needed so that infrastructure development strategies can run effectively and sustainably.</i>
Keywords Bapperida Strategy; Planning and Development; Regional Infrastructure.	

PENDAHULUAN

Strategi pembangunan saat ini telah menjadi faktor penting dalam mendorong perkembangan suatu daerah. Di Indonesia, perencanaan pembangunan daerah telah mendapatkan perhatian lebih melalui berbagai kebijakan pemerintah yang menekankan pentingnya strategi pembangunan. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia semakin menekankan pentingnya penyusunan strategi pembangunan yang transparan dan partisipatif, diantaranya seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang disusun oleh masing-masing daerah dengan didasari dengan potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi wilayah tersebut. Hal ini sesuai yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunannya yang berisikan strategi pembangunan daerah.

Proses pembangunan saat ini tidak hanya bergantung pada alokasi sumber daya, tetapi juga pada perencanaan strategis yang baik, yang dapat memfasilitasi inovasi dan keterlibatan berbagai pihak. Pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Indonesia telah menjadi salah satu prioritas utama, dalam mencapai hal tersebut cara yang dilakukan adalah melalui implementasi strategi pembangunan ekosistem inovasi. Implementasi strategi tersebut dapat dilakukan melalui program maupun kegiatan kontestasi inovatif yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan ide dan solusi inovatif yang mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan di daerahnya (Bahri dan Kurniati, 2025).

Selanjutnya, dalam pembangunan suatu daerah diperlukan arah yang strategis dan berorientasi pada masa depan. Kemampuan untuk melakukan pembangunan secara berkelanjutan sangat penting bagi setiap daerah yang ingin mencapai kesejahteraan. Hal ini tentu saja harus didukung oleh kemampuan daerah dalam menciptakan persaingan yang sehat. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, strategi pembangunan yang tepat menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan visi dan misi daerah, serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu merumuskan strategi yang nantinya menjadi pedoman dalam mencapai tujuan tersebut (Kurniawan dan Artisa, 2023).

Pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan strategis yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang mendorong pembangunan inklusif dan berkelanjutan. SDGs merupakan komitmen global yang didorong oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghilangkan kemiskinan, menjaga kelestarian lingkungan, dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia hingga tahun 2030. Agenda ini bertujuan untuk memberikan arah bagi pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan holistik. SDGs terdiri dari 17 tujuan utama, 169 target, dan lebih dari 230 indikator yang saling terkait, yang dirancang untuk menjawab berbagai tantangan global yang kompleks, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, perubahan iklim, serta perlunya menjaga keberlanjutan pembangunan (Musrafiyan, 2021).

Berbeda dengan pendekatan pembangunan sebelumnya, SDGs menawarkan kerangka kerja yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga memberikan perhatian yang sama besar terhadap kemajuan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan hidup. Komitmen Indonesia terhadap implementasi SDGs tercermin dari upaya nyata untuk mengintegrasikan agenda global ini ke dalam perencanaan pembangunan nasional hingga ke tingkat daerah, salah satunya dengan menyelaraskan SDGs dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan berbagai kebijakan turunan di tingkat daerah, yang disusun dan diimplementasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). RPJMN berfungsi sebagai pijakan utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang mencakup berbagai aspek prioritas yang sesuai dengan tujuan SDGs. Dengan menyelaraskan kebijakan nasional pada berbagai sektor dengan tujuan-tujuan ini menunjukkan tekad Indonesia untuk tidak meninggalkan satu pun individu atau kelompok dalam perjalanan menuju pembangunan global yang lebih baik (Zen *et al.*, 2025).

Selain langkah pemerintah, keterlibatan multipihak juga menjadi elemen kunci dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia. Pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat luas untuk memastikan implementasi SDGs berjalan efektif dan inklusif. Kolaborasi lintas sektor ini memungkinkan terciptanya solusi yang inovatif, relevan, dan berdampak luas. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa juga sangat penting untuk mencapai tujuan SDGs. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, program pembangunan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan meningkatkan keberlanjutan. Dengan pendekatan ini, pemerintah Indonesia tidak hanya berkomitmen untuk mencapai target pembangunan nasional yang lebih baik, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan agenda global SDGs secara berkelanjutan dan inklusif (Rahmawati *et al.*, 2024).

Menurut Ardiansyah dan Fatimah (2021), pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan pembangunan yang menekankan pada keseimbangan antara aspek ekonomi,

sosial, dan lingkungan. Dalam konteks tata ruang wilayah, prinsip ini digunakan untuk merancang kebijakan pembangunan yang inklusif dan tidak eksploitatif. Salah satu indikator utama keberlanjutan adalah partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan menuntut pendekatan integratif dan partisipatif. Untuk itu, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil sangat diperlukan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh.

Jika kita berbicara pembangunan, maka tidak akan terlepas dari pembangunan infrastruktur. Menurut Soliha (2022), pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi, ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur, seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan daerah, keberadaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, jaringan air bersih, sanitasi, listrik, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan menjadi indikator penting bagi kemajuan suatu wilayah. Kebijakan infrastruktur dapat dijadikan strategi induk oleh pemerintah, yakni menjadi lokomotif pergerakan perekonomian. Menurut Kasmira *et al.* (2020), pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu, maka pemerintah perlu meningkatkan perhatian publik terhadap infrastruktur, sekaligus melaksanakan kebijakan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu poin arah kebijakan dalam menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi serta kemandirian sosial dan ekonomi.

Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan infrastruktur pendukung. Menanggapi hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah memiliki peran strategis dalam merumuskan strategi pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur.

Dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, infrastruktur masuk ke dalam klaster isu strategis daerah yang menekankan pada peningkatan konektivitas wilayah, penguatan infrastruktur dasar, serta pengelolaan tata ruang yang berkelanjutan. Namun, dalam implementasinya, strategi pembangunan infrastruktur sering menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta dinamika sosial dan geografis wilayah yang luas.

Di Indonesia, banyak penelitian yang mendalami pengaruh infrastruktur terhadap perekonomian dengan hasil yang bervariasi. Suriani & Keusuma (2015) menemukan bahwa infrastruktur, dalam hal ini listrik dan pendidikan, memberikan pengaruh yang positif dan signifikan pada pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. Namun, kebijakan pembangunan infrastruktur yang terpusat di Jawa dan Indonesia bagian barat menimbulkan disparitas pendapatan per kapita masing-masing daerah di Indonesia, terutama di Kawasan Indonesia Timur. Lebih lanjut, penelitian Winata *et al.* (2018) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur, di antaranya elektrifikasi, jalan beraspal, dan air bersih.

Selain itu, hasil dari beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa implementasi SDGs di tingkat daerah masih menghadapi beragam kendala, termasuk kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga, disparitas yang terlihat di tingkat regional, keterbatasan dalam pendanaan, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya SDGs (Handini *et al.*, 2025). Oleh karena itu, pelaksanaan kampanye edukasi yang menyeluruh dan transparansi dalam proses pelaksanaan kebijakan menjadi langkah krusial untuk mempercepat pencapaian SDGs di Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan semua elemen masyarakat dapat lebih memahami dan berkontribusi aktif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan, sehingga menciptakan dampak positif yang luas bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Mengingat tantangan-tantangan tersebut, maka penting untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) dalam merumuskan kebijakan strategis pembangunan infrastruktur daerah di Kabupaten Sumbawa yang berkontribusi pada pencapaian SDGs. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk memahami dampak kebijakan yang telah diterapkan, tetapi juga untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dan mencari solusi yang efektif. Berdasarkan konteks tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Bappeda Kabupaten Sumbawa dalam menangani isu strategis infrastruktur tahun 2024-2025, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas implementasi strategi tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2021), penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena atau kejadian apa adanya tanpa memanipulasi variabel, menggunakan data non-numerik seperti wawancara dan observasi untuk memahami kenyataan sosial secara mendalam. Tujuannya adalah memberikan gambaran utuh dan rinci mengenai karakteristik, kualitas, serta keterkaitan dari suatu kejadian atau keadaan yang diamati.

Dalam konteks penelitian ini, penggunaan metode deskriptif kualitatif pada penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai strategi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dalam menangani isu strategis infrastruktur di Kabupaten Sumbawa.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa, yang dilaksanakan pada Oktober 2025 hingga Januari 2026. Adapun subjek penelitian meliputi Kepala Bappeda, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda, Kasubag Umum PUPR, Sekretaris Dinas Kominfo, Ketua Komisi III DPRD, serta tokoh masyarakat.

Pemilihan sekolah dan subjek penelitian ini sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan yang kuat bahwa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu, maka pemerintah perlu meningkatkan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur sebagai salah satu poin arah kebijakan dalam menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi serta kemandirian sosial dan ekonomi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi Kepala Bappeda, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda, Kasubag Umum PUPR, Sekretaris Dinas Kominfo, Ketua Komisi III DPRD, serta tokoh masyarakat. Sementara teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung yang relevan dengan penelitian ini, seperti peraturan daerah, arsip dan laporan keuangan, serta dokumen pendukung lainnya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman (2019) yang meliputi tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan kerangka teori manajemen strategi yang dikembangkan oleh David & David (2017), meliputi tiga tahapan utama, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Selain itu, penelitian juga menggunakan teori implementasi kebijakan publik George C. Edward III (dalam Tiwa *et al.*, 2023) untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan strategi, meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai informan yang berbeda. Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi) untuk memvalidasi temuan penelitian (Sugiyono, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi BAPPERIDA dalam Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan jalan merupakan sebagian dari wewenang penyelenggaraan infrastruktur, antara lain meliputi kegiatan-kegiatan: (1) perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi; (2) pengoperasian dan pemeliharaan; dan (3) pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan swakelola dan dengan cara menggunakan penyedia barang/jasa. Pengadaan barang/jasa diwajibkan menerapkan prinsip-prinsip efektif dan efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, serta akuntabel. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada dasarnya perlu dilakukan dengan penyedia barang/jasa. Namun demikian pekerjaan-pekerjaan tertentu dapat dilakukan dengan cara swakelola, baik swakelola yang dilakukan: (1) oleh pengguna anggaran sendiri; (2) oleh instansi pemerintah lain; atau (3) oleh kelompok masyarakat (Warsilan dan Noor, 2015).

Dalam proses ini, BAPPERIDA Kabupaten Sumbawa memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur, seperti berikut ini:

1. RPJPD (25 Tahun Perencanaan)
2. RPJMD (5 Tahun Perencanaan)
3. RKPD (1 Tahun Perencanaan)
4. Melakukan koordinasi perencanaan di antara Dinas-dinas Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-Instansi vertikal Daerah-daerah serta Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Daerah
5. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah
6. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut

7. Melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Kepala Daerah.

Peran BAPPERIDA sebagai perencanaan pembangunan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari kebijakan publik yang dirumuskan dan ditetapkan dalam membangun pemerintahan yang demokratis dan partisipatif untuk meningkatkan kesadaran publik akan peran dan tanggung jawabnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Jika merujuk kepada BAPPERIDA sebagai pelaksana, maka adanya keikutsertaan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan daerah.

Strategi BAPPERIDA dalam Menangani Isu Strategis Infrastruktur

Secara umum, proses pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pembangunan selalu diawali dengan adanya ide gagasan untuk membangun, selanjutnya ide ini dituangkan ke dalam perencanaan atau konsep pembangunan. Konsep pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam program pembangunan untuk dilaksanakan. Dalam proses pelaksanaan dilakukan monitoring dan pengawasan pembangunan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan program yang ada dan apakah pembangunan sesuai dengan kebutuhan wilayah (Ma'ruf dan Daud, 2013).

1. Perumusan Strategi BAPPERIDA dalam Menangani Isu Strategis Infrastruktur

Proses perumusan strategi perencanaan infrastruktur di Bappeda Kabupaten Sumbawa diawali dengan tahapan identifikasi dan pemetaan permasalahan infrastruktur melalui analisis sektoral yang komprehensif. Analisis ini dilakukan dengan mengevaluasi kinerja pembangunan infrastruktur periode sebelumnya dan mengintegrasikan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) dari berbagai tingkatan, mulai dari desa hingga kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda, proses perumusan strategi melibatkan koordinasi intensif dengan sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani sektor infrastruktur. Koordinasi ini dilakukan melalui forum-forum teknis seperti Forum OPD dan rapat koordinasi rutin untuk memastikan sinkronisasi program dan kegiatan antarsektor.

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) menjadi landasan pengambilan keputusan strategis dalam perumusan strategi pembangunan infrastruktur. Kekuatan yang dimiliki meliputi komitmen politik yang kuat dari pimpinan daerah, ketersediaan dokumen perencanaan yang komprehensif, serta dukungan regulasi yang memadai. Kelemahan utama teridentifikasi pada keterbatasan anggaran daerah, ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta kapasitas SDM teknis yang masih perlu ditingkatkan.

Peluang yang dapat dimanfaatkan mencakup alokasi dana transfer pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa, potensi kerjasama dengan sektor swasta, serta program-program nasional yang mendukung pembangunan infrastruktur daerah. Ancaman yang dihadapi meliputi dinamika ekonomi dan inflasi yang mempengaruhi harga material konstruksi, kompleksitas regulasi dan birokrasi, serta kondisi geografis yang menantang.

2. Implementasi Strategi Pembangunan Infrastruktur

Implementasi strategi pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara sistematis melalui penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen perencanaan operasional yang lebih detail. Dokumen

tersebut meliputi Rencana Strategis (Renstra) OPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja) OPD yang disusun setiap tahun dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan ketersediaan anggaran.

Program prioritas infrastruktur yang dilaksanakan mencakup empat aspek utama yaitu peningkatan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, irigasi), penguatan konektivitas wilayah, pengembangan kewilayahan yang seimbang, serta dukungan perencanaan berbasis data dan teknologi. Upaya peningkatan aksesibilitas ke daerah terpencil telah menunjukkan hasil nyata, seperti pengaspalan jalan ke wilayah Tepal yang sebelumnya sulit dilalui.

Koordinasi dan komunikasi antar OPD menjadi kunci keberhasilan implementasi strategi. Mekanisme koordinasi dilakukan melalui rapat koordinasi rutin, forum OPD, serta pelibatan masyarakat dalam Musrembang berjenjang. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai leading sector dalam pelaksanaan pembangunan fisik infrastruktur melakukan koordinasi intensif dengan Bappeda untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan.

Pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dilakukan secara formal melalui forum Musrembang berjenjang dari tingkat desa hingga kabupaten, serta melalui reses DPRD. Selain itu, pendekatan informal seperti safari Ramadan dan kunjungan langsung pimpinan daerah ke desa-desa juga menjadi sarana komunikasi yang efektif untuk menampung aspirasi masyarakat terkait kebutuhan infrastruktur.

3. Evaluasi Strategi dan Monitoring Kinerja

Mekanisme evaluasi strategi bidang infrastruktur dilaksanakan secara periodik setiap akhir tahun melalui sistem pelaporan yang melibatkan sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani sektor infrastruktur. Evaluasi dilakukan melalui pengukuran kinerja pembangunan daerah yang dituangkan dalam laporan evaluasi RPJMD dan RKPD dengan menggunakan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Indikator keberhasilan infrastruktur yang diterapkan bersifat multidimensi dengan pendekatan outcome-based yang mengukur dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Indikator teknis meliputi persentase jalan mantap, cakupan layanan air bersih, rasio jaringan irigasi, dan tingkat konektivitas antarwilayah. Indikator dampak mencakup peningkatan aksesibilitas ekonomi, pengurangan waktu tempuh, dan peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perdagangan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah, meskipun masih terdapat kebutuhan untuk perbaikan pada aspek pemerataan distribusi pembangunan di wilayah terpencil. Temuan evaluasi mengindikasikan adanya peningkatan signifikan dalam kualitas infrastruktur dasar, namun ketimpangan antarwilayah masih menjadi tantangan yang perlu ditangani secara serius.

Selain mekanisme pengawasan legislatif melalui DPRD, evaluasi pembangunan infrastruktur juga diperkuat dengan sistem audit multi-lapis yang melibatkan lembaga-lembaga pengawasan eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Daerah, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sistem pengawasan yang komprehensif ini memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur.

Faktor-Faktor yang Penghambat Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan terkait *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kabupaten Sumbawa merupakan sebuah upaya penting dalam menangani isu strategis infrastruktur di Kabupaten Sumbawa. Namun dalam pelaksanaannya sering kali kebijakan yang dihasilkan tidak mencerminkan realitas di lapangan, sehingga terjadi kesenjangan antara tujuan yang ditetapkan dan hasil yang dicapai. Beberapa kendala yang diduga menghambat kebijakan SDGs di Kabupaten Sumbawa, diantaranya adalah:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor fundamental dalam keberhasilan implementasi strategi kebijakan pembangunan infrastruktur. Mekanisme komunikasi dilaksanakan melalui sistem koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan di berbagai level pemerintahan. Rapat koordinasi teknis antar OPD dilakukan secara rutin untuk membahas kemajuan pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, serta solusi yang perlu diambil.

2. Sumber Daya

Sumber daya menjadi faktor determinan dalam efektivitas implementasi kebijakan infrastruktur. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan utama, dengan hanya 8 OPD besar dan 15 OPD kecil yang menangani berbagai sektor pembangunan. Kompetensi dan jumlah SDM teknis belum merata di semua sektor, sementara kebutuhan akan tenaga ahli di bidang perencanaan infrastruktur terus meningkat. Sumber daya anggaran juga menjadi kendala signifikan dalam pembangunan infrastruktur. Untuk mengatasi keterbatasan ini, strategi yang ditempuh adalah mengintegrasikan program unggulan dan prioritas daerah dengan program-program nasional. Pendekatan sinergitas ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana transfer pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah.

3. Disposisi

Disposisi atau komitmen aparatur dalam implementasi kebijakan menunjukkan tingkat yang baik. Komitmen aparatur Bappeda dan Dinas PUPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tergolong kuat, dengan dedikasi tinggi terhadap pencapaian target pembangunan infrastruktur. Dukungan kepemimpinan dari pimpinan daerah juga sangat berpengaruh terhadap percepatan realisasi program-program prioritas.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang ada telah dirancang secara sistematis untuk mendukung tiga fungsi utama dalam pembangunan infrastruktur, yaitu fungsi perencanaan, koordinasi, dan evaluasi. Pembagian tugas terkait infrastruktur telah terstruktur dengan jelas melalui dua kelompok besar, yaitu Infrastruktur dan Kewilayahan, yang masing-masing memiliki tanggung jawab spesifik dalam mendukung pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa telah menjalankan strategi dalam menangani isu strategis infrastruktur melalui tahapan perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi. Perumusan strategi dilakukan dengan memasukkan isu infrastruktur ke dalam dokumen perencanaan daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sumbawa serta mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Implementasi strategi dilaksanakan melalui koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait, pelaksanaan Musrembang, serta penyesuaian program dan kegiatan infrastruktur sesuai prioritas daerah.

Evaluasi strategi dilakukan melalui monitoring dan evaluasi untuk menilai capaian pembangunan infrastruktur. Namun, pelaksanaan strategi tersebut masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan koordinasi antar instansi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, penguatan kapasitas kelembagaan, dan optimalisasi sumber daya agar penanganan isu infrastruktur di Kabupaten Sumbawa dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Disarankan agar Bappeda Kabupaten Sumbawa terus memperkuat koordinasi dan sinergi antar OPD dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan penguatan kapasitas perencana.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa yang telah memberikan izin dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang sangat berharga bagi penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, R., & Fatimah, N. (2021). Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Tinjauan Kebijakan dan Tantangan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(2), 234-248.
- Bahri, S., & Kurniati, E. (2025). Strategi Pembangunan Berkelanjutan Perkotaan-Pedesaan: Studi Kasus Provinsi Lampung. *Global: Jurnal Lentera BITEP*, 3(3), 117-131.
- David, F. R., & David, F. R. (2017). *Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases*. England: Pearson Education Limited.
- Handini, N., Darwina, M., Yudistira, & Pangestoeti, W. (2025). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Lokal Melalui Inovasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(5), 964-986.
- Kasmira, K., Alyas, A., & Sudarmi, S. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (Kimap)*, 1(3), 818-833.
- Kurniawan, T., & Astuti, S. (2019). Tantangan Pemerintah Daerah dalam Era Desentralisasi Pembangunan. *Jurnal Otonomi Daerah*, 11(2), 78-91.
- Ma'ruf, Y. P., & Daud, J. (2013). Pengaruh Investasi infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Teknik Sipil USU*, 2(3), 1-13.
- Moleong, L.J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. 40)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Musrafiyan, M. (2021). Potensi Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Halal Barsela Sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas di Era Society 5.0. *Proceedings of International Conference on Islamic Studies "Islam & Sustainable Development*, 488-501.

- Phasa, N. P., & Andriyus. (2024). Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Di Desa Pandau Jaya. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 1(3), 409-416.
- Rahmawati, A., Lubis, D. S., & Damisa, A. (2024). Determinasi Kemiskinan Di Sumatera Analisis Empiris Terhadap Faktor Demografi, Kesehatan, Pendidikan, IPM, dan PDRB (2019-2023). *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 157-174.
- Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa.
- Soliha, W. (2022). Strategi Badan Perencanaan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Co-Value : Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, 11(1), 37-41.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suriani, S., & Keusuma, C. N. (2015). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(1), 1-18.
- Tiwa, R. C., Posumah, J. H., & Londa, V. Y. (2023). Implementasi Kebijakan Dalam Menangani Kekacauan Antar Desa Di Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(9), 339-350.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.
- Warsilan, W., & Noor, A. (2015). Peranan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Implikasi Pada Kebijakan Pembangunan Di Kota Samarinda. *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31(2), 359-366.
- Winata, O. H., Anwar, S., & Sitorus, H. (2018). Strategi Pembangunan Infrastruktur Fisik Pada Rpjmn 2015-2019 Dalam Mendukung Sistem Pertahanan Negara. *Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta*, 4(3), 57-76.
- Zen, N. H., Mageiasti, L., & Yulhendri. (2025). Analisis Penerapan SDGs Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Tinjauan Literatur Dan Tantangan Implementasi. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(1), 775-785.